

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional harus bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam menopang pembangunan nasional. Secara kelembagaan perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, disamping ia harus tunduk kepada peraturan khusus tentang perbankan syariah itu sendiri dan menjadi kekhasannya yaitu kepatuhan syariahnya (Kalsum, 2018)

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan diberlakukannya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat dikarenakan ketersediaan dan standarisasi produk. Hal ini dikarenakan masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip utama yang di ikuti oleh Bank Islami kesepakatan bersama (Sudarsono, 2003:22). Pengesahan Undang-Undang yang menandai periode baru dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia, diantaranya adalah terbukanya peluang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada akhir tahun yang sama. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mendorong munculnya Bank-Bank Syariah baru, baik yang merupakan *spin off* Unit Usaha Syariah maupun Bank Konvensional. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 bank syariah memiliki jaringan sebesar 2.169 dengan 13 BUS dan 21 UUS (Tabel 1.1)

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Kelembagaan	13 BUS 21 UUS	14 BUS 20 UUS	14 BUS 20 UUS	14 BUS 20 UUS	12 BUS 21 UUS
Jaringan	2.169	2.229	2.300	2.426	2.479
Aset (Rp Tn)	424,17	477,33	524,56	594,587	676,74
Dana Pihak Ketiga (Rp Tn)	334,89	371,83	416,56	465,97	536,99
Market Share	5,78%	5,96%	6,18%	6,51%	6,74%

Sumber : www.ojk.co.id, Tahun 2022

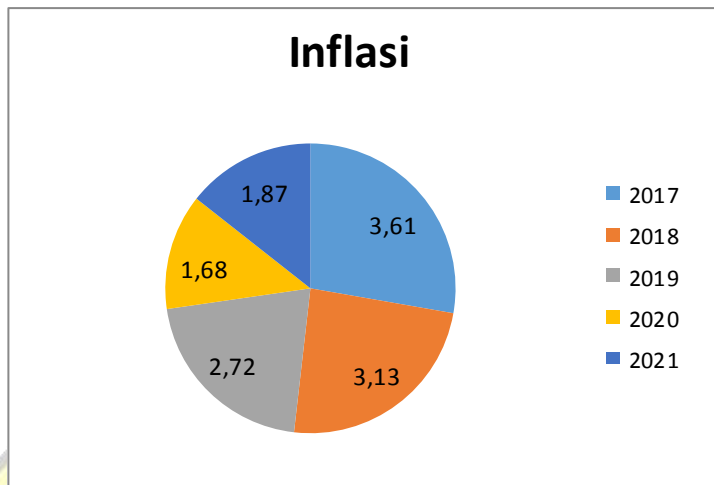
Salah satu peranan penting perbankan ialah kemampuannya dalam menghimpun dana pihak ketiga. Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah tersebut sebagai *financial intermediary* berjalan baik. Hal ini pun sejalan dengan Bank Muamalat Indonesia yang dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dikatakan berhasil meskipun pada beberapa tahun kebelakang perbankan syariah di Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Perkembangan DPK Bank Muamalat Indonesia

Jenis Dana (jutaan)	2017	2018	2019	2020	2021
Giro	1.951.367	1.149.014	1.131.496	1.540.647	2.052.624
Tabungan	10.200.677	10.662.735	10.308.668	9.748.459	10.452.597
Deposito	30.185.030	27.833.681	21.913.293	22.775.930	24.689.726
Jumlah DPK	42.337.074	39.605.430	33.353.457	34.065.036	37.194.947

Sumber : www.bankmuamalat.co.id, Tahun 2022

Bank syariah dalam penghimpunan dana dari masyarakat dipengaruhi oleh variabel makro lainnya, seperti tingkat inflasi dan kurs dollar. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.

Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi

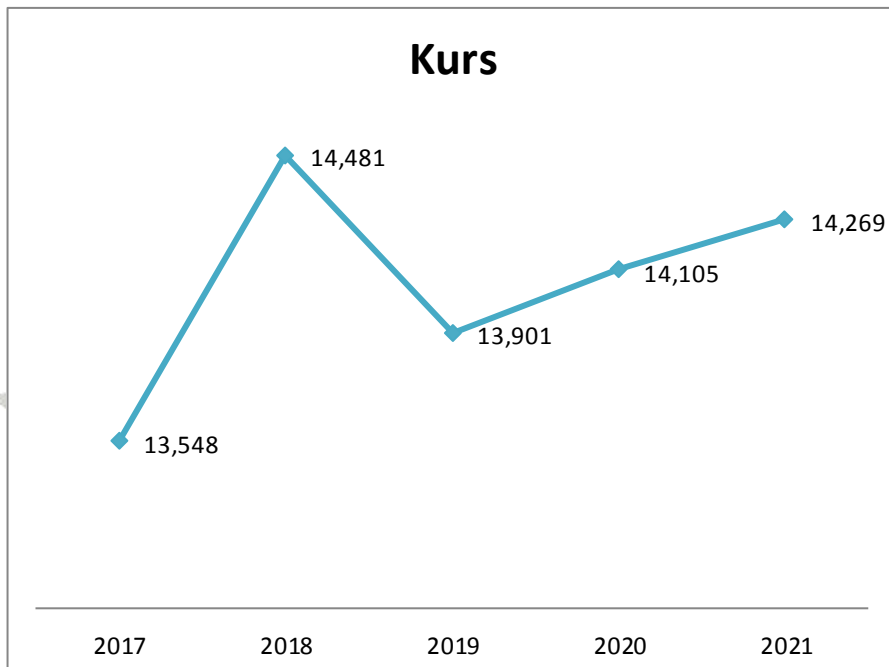
Sumber : www.bi.go.id, Tahun 2022

Dari gambar diatas terlihat bahwa perkembangan tingkat inflasi dalam kondisi fluktuatif, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan menembus angka 3%. Tidak hanya tingkat inflasi yang mengalami kondisi fluktuatif, nilai tukar Rp terhadap dollar (Kurs dollar) juga mengalami fluktuatif.

Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar (exchange rate). pada dasarnya yang dimaksud dengan kurs adalah harga atau nilai tukar valuta atau mata uang sebuah negara dengan mata uang negara lain. Kurs mempunyai peran yang sangat penting, khususnya pada pada aktivitas impor dan ekspor. Dengan begitu proses transaksi bisa

berjalan dengan lancar serta tidak menyebabkan kerugian terhadap pihak yang terlibat.

Gambar 1.2 Perkembangan Kurs



Sumber : www.satudata.kemendag.go.id, Tahun 2022

Dapat dilihat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap dollar pada tahun 2019 berada pada level Rp 13.901 per dollar AS, sementara pada tahun 2017 dilevel Rp 13.548. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap kurs dollar di akibatkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang, penurunan harga komoditas serta perbedaan arah kebijakan moneter dan fiskal diberbagai kawasan.

Pergerakan naik turun ini tergantung dari seberapa besarnya jumlah permintaan dan penawaran akan mata uang tersebut. Jika permintaan terhadap mata uang tersebut meningkat maka nilai tukar mata uang tersebut akan menurun. Jika fluktuasi kurs sering berubah tajam, hal ini dapat menjadi indikasi buruk bagi perekonomian suatu negara karena mencerminkan kondisi perekonomian tidak stabil. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Kurs dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021)”**

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka penulis memberikan batasan masalah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Makro ekonomi yang di teliti pada penelitian ini adalah inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil.
2. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga dari Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh kurs terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pengaruh inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia, serta sebagai syarat menyelesaikan program S1 pada prodi perbankan syariah.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan referensi kepustakaan IAIN Kendari khususnya pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan strategi baru maupun meningkatkan kinerja dari perbankan syariah.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini.

1.6.1 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2017).

1.6.2 Kurs

Nilai tukar (kurs) adalah perbandingan nilai tukar uang suatu Negara dengan mata uang Negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar Negara. Pengukuran nilai atau nilai tukar dipengaruhi oleh besarnya volume perdagangan Negara tersebut. Pengukuran nilai kurs ini secara umum dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga yang berlaku pada suatu negara dibandingkan perubahan tingkat harga pada Negara partnernya (Leni Saleh, 2016).

1.6.3 Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* merupakan instrumen penting yang membedakan operasional bank syariah dengan bank-bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank konvensional (Yudiana, 2014).

1.6.4 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang berupa deposito, tabungan dan giro. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan (Nurjannah & Maguni, 2021).

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data.